

**ANALISIS TRANSPARANSI PELAKSANA KONSTRUKSI
PADA PENYELENGGARAAN PROYEK PEMERINTAH DI
JAWA BARAT**

TUGAS AKHIR

disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Teknik Program
Studi Teknik Sipil S1



Oleh:

FEBRIAN MUSTIKA DILLA

1500428

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL S1
DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG
2019**

**ANALISIS TRANSPARANSI PELAKSANA KONSTRUKSI PADA
PENYELENGGARAAN PROYEK PEMERINTAH DI JAWA BARAT**

Oleh :
Febrian Mustika Dilla

Sebuah tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan

© Febrian Mustika Dilla 2019
Universitas Pendidikan Indonesia
Agustus 2019

Hak cipta dilindungi undang-undang
Tugas akhir ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian dengan dicetak ulang, difotokopi, atau cara lainnya tanpa ijin penulis.

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

**ANALISIS TRANSPARANSI PELAKSANA KONSTRUKSI PADA
PENYELENGGARAAN PROYEK PEMERINTAH DI JAWA BARAT**

FEBRIAN MUSTIKA DILLA

1500428

Disetujui dan disahkan oleh pembimbing :

Pembimbing I



Dewi Yustiarini, S.T., M.T.

NIP. 19800802 200801 2 009

Pembimbing II



Dr. H. Nanang Dalil Herman, S.T., M.Pd.

NIP. 19620202 198803 1 002

Mengetahui,

Ketua Departemen
Pendidikan Teknik Sipil



Dr. Dra. Rina Marina Masri, M.P.

NIP. 19650530 199101 2 001

Ketua Program Studi
Teknik Sipil



Dr. H. Nanang Dalil Herman, S.T., M.Pd

NIP. 19620202 198803 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas tugas akhir dengan judul **“Analisis Transparansi Pelaksana Konstruksi pada Penyelenggaraan Proyek Pemerintah di Jawa Barat”**.

Penulisan tugas akhir ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana teknik dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Pendidikan Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada pembaca untuk memberikan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, Agustus 2019

Febrian Mustika Dilla

1500428

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu, yaitu :

1. Dewi Yustiarini, ST.,MT, selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan motivasi dalam penulisan tugas akhir.
2. Dr. H. Nanang Dalil Herman, ST., MPd, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan motivasi dalam penulisan tugas akhir.
3. Dr. H. Nanang Dalil Herman, ST., MPd., selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil yang selalu bersedia mendukung dan memberikan bimbingan selama penulisan tugas akhir.
4. Dr. Dra. Rina Marina Masri, M.P., selaku Ketua Departemen Pendidikan Teknik Sipil.
5. Seluruh civitas akademika Departemen Pendidikan Teknik Sipil FPTK UPI beserta seluruh dosen yang telah memberikan ilmu dan saran dalam penulisan tugas akhir.
6. Kepada kedua orang tua penulis yang selalu memberikan do'a dan dukungan penuh dalam penyusunan tugas akhir ini.
7. Kepada teman-teman Teknik Sipil FPTK UPI 2015 yang bersama-sama berjuang selama masa perkuliahan dan selalu memberi dorongan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan tugas akhir ini.

ANALISIS TRANSPARANSI PELAKSANA KONSTRUKSI PADA PENYELENGGARAAN PROYEK PEMERINTAH DI JAWA BARAT

Febrian Mustika Dilla, Dewi Yustiarini¹⁾, Nanang Dalil Herman²⁾

Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan,
Universitas Pendidikan Indonesia

Email: febrianmustika@gmail.com

dewiyustiarini@upi.edu

nanangdalilherman@upi.edu

ABSTRAK

Penyelenggaraan proyek pemerintah harus memiliki keterbukaan informasi publik publik yang terdiri dari 3 unsur utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Penyelenggaraan proyek pemerintah di Jawa Barat tapi faktanya tidak transparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran transparansi menurut persepsi pelaksana konstruksi pada sektor pemerintah dan membandingkan indikator CoST dengan kondisi eksisting dilapangan. Penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi indikator KIP di bidang Jasa Konstruksi dan indikator yang dikeluarkan oleh *Construction Sector Transparency Initiative* (CoST). Populasi dalam penelitian ini yaitu pelaksana konstruksi di Jawa Barat. Sampel penelitian ini adalah pelaksana konstruksi usaha menengah dan usaha besar menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 08 Tahun 2011. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner secara *online* dan wawancara langsung kepada 80 reponden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis faktor dengan metode *Principyal Component Analysis* (PCA). Hasil penelitian menunjukkan faktor yang mempengaruhi transparansi penyelenggaraan konstruksi menurut pelaksana konstruksi di Jawa Barat terdiri dari 36 variabel yang dikelompokkan menjadi 7 faktor. Gambaran transparansi berdasarkan fase penyelenggaraan proyek dengan nilai rata-rata 71,80% dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan indikator transparansi CoST di Jawa Barat cukup transparan. Sedangkan gambaran tingkat transparansi berdasarkan badan usaha, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai tingkat transparansi 74,18%, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mempunyai tingkat transparansi 70,80% dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) mempunyai tingkat transparansi 71,53%. Sehingga dapat disimpulkan BUMN sebagai badan usaha yang memiliki tingkat transparansi tertinggi.

Kata kunci: Proyek, Transparansi, Pelaksana Konstruksi, *Principyal Component Analysis*

¹⁾ Dosen Penanggung Jawab Kesatu

²⁾ Dosen Penanggung Jawab Kedua

TRANSPARENCY ANALYSIS OF CONTRACTORS AT GOVERNMENT PROJECT IMPLEMENTATION IN WEST JAVA

Febrian Mustika Dilla, Dewi Yustiarini¹⁾, Nanang Dalil Herman²⁾

Civil Engineering Study Program, Faculty of Technology and Vocational Education, Indonesia University of Education

Email: febrianmustika@gmail.com

dewiyustiarini@upi.edu

nanangdalilherman@upi.edu

ABSTRACT

The implementation of government projects must have public information disclosure which consists of 3 main elements namely transparency, accountability, and public participation. The implementation of government projects in West Java but the fact is not transparent. This study aims to find out the picture of transparency according to the perception of construction implementers in the government sector and compare CoST indicators with existing conditions in the field. The study was conducted by identifying KIP indicators in the field of Construction Services and indicators issued by the Construction Sector Transparency Initiative (CoST). The population in this study is the executor of construction in West Java. The sample of this study is the executor of medium and large business construction according to Minister of Public Works Regulation No. 08 of 2011. Data collection was carried out by distributing online questionnaires and direct interviews to 80 respondents. The data analysis technique used is factor analysis with the Princypal Component Analysis (PCA) method. The results showed that factors affecting the transparency of the implementation of construction according to the executor of construction in West Java consisted of 36 variables grouped into 7 factors. The description of transparency based on the project implementation phase with an average value of 71.80% can be concluded that the implementation of the CoST transparency indicator in West Java is quite transparent. While the level of transparency is based on business entities, State-Owned Enterprises (BUMN) have a transparency level of 74.18%, Regional-Owned Enterprises (BUMD) has a transparency level of 70.80% and Private-Owned Enterprises (BUMS) has a transparency level of 71, 53%. So it can be concluded that BUMN is a business entity that has the highest level of transparency.

Keywords: Projects, Transparency, Construction Executors, Princypal Component Analysis

DAFTAR ISI

LEMBAR HAK CIPTA	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.5 Struktur Organisasi Tugas Akhir	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA	5
2.1 Analisis	5
2.2 Transparansi.....	6
2.2.1 Definisi Transparansi	6
2.2.2 Prinsip Dasar Transparansi	8
2.2.3 Dimensi Transparansi	9
2.2.4 Indikator Transparansi	11
2.2.5 Transparansi dalam Landasan Hukum di Indonesia ...	14
2.3 Pelaksana Konstruksi (Kontraktor).....	19
2.4 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	24
2.5 Jasa Konstruksi Sektor Pemerintah.....	26
2.6 Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	29

3.2	Metode Penelitian	29
3.3	Sumber Data	30
3.4	Populasi dan Sampel.....	30
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6	Teknik Analisis Data	32
3.6.1	Uji Kualitas Instrumen.....	32
3.6.2	Statistik Deskriptif	32
3.6.3	Uji Normalitas	32
3.6.4	<i>Principal Component Analysis (PCA)</i>	33
3.6.5	Transformasi Skor Transparansi.....	33
3.7	Tahapan Penelitian.....	34
3.8	Kerangka Penelitian (Paradigma Penelitian)	36
3.9	Prosedur Penelitian	37
BAB IV	TEMUAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1	Responden Penelitian.....	38
4.2	Karakteristik Responden.....	38
4.3	Uji Kualitas Responden	42
4.3.1	Uji Validitas	42
4.3.2	Uji Reliabilitas	44
4.4	Statistik Deskriptif.....	45
4.5	Uji Normalitas.....	46
4.6	Uji Hasil demean Analisis Faktor.....	47
4.6.1	Uji Korelasi dan Kelayakan Suatu Variabel	47
4.6.2	Proses Factoring atau Ekstraksi	53
4.6.3	Rotasi Faktor	57
4.7	Pembahasan	65
4.7.1	Uji Korelasi	65
4.7.2	Factoring atau Ekstraksi.....	66
4.7.3	Faktor Rotasi	72
4.7.4	Hasil Interpretasi Penelitian	73
4.8	Gambaran Transparansi Pelaksana Konstruksi Pada Penyelenggaraan Proyek Pemerintah di Jawa Barat.....	76

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI	79
5.1 Simpulan.....	79
5.2 Implikasi dan Rekomendasi	79
DAFTAR PUSTAKA81
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Transparansi	7
Gambar 2.2 Logo <i>Construction Sector Transparency Initiative (CoST)</i>	13
Gambar 2.3 Transparansi dalam Perundang-Undangan Indonesia	18
Gambar 3.1 Alur Pengolahan Data	35
Gambar 3.2 Diagram Kerangka Berpikir	36
Gambar 3.3 Diagram Alir Penelitian	37
Gambar 4.1 Diagram Pendidikan Terakhir Responden	39
Gambar 4.2 Diagram Pengalaman Kerja Responden	40
Gambar 4.3 Diagram Kualifikasi Usaha Responden	41
Gambar 4.4 <i>Scree Plot</i> Hasil Ekstraksi Faktor	57
Gambar 4.5 <i>Component Plot In Rotated Space</i>	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Standar Transparansi Data Infrastruktur Publik	14
Tabel 2.2 Klasifikasi Kontraktor Menurut Lingkup Kerja	19
Tabel 2.3 Kualifikasi Usaha Pelaksana Konstruksi	21
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	29
Tabel 4.1 Pendidikan Terakhir Responden	38
Tabel 4.2 Pengalaman Kerja Responden	39
Tabel 4.3 Kualifikasi Usaha Responden	40
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Bersasarkan Badan Usaha	41
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Bersasarkan Kualifikasi Usaha.....	41
Tabel 4.6 Uji Validitas Variabel Identifikasi Proyek	42
Tabel 4.7 Uji Validitas Variabel Persiapan Proyek	42
Tabel 4.8 Uji Validitas Variabel Penyelesaian Proyek	43
Tabel 4.9 Uji Validitas Variabel Pengadaan	43
Tabel 4.10 Uji Validitas Variabel Implementasi	44
Tabel 4.11 Uji Reliabilitas	45
Tabel 4.12 Statistik Deskriptif	45
Tabel 4.13 Statistik Tingkat Transparansi Berdasarkan Jenis Usaha	45
Tabel 4. 14 Tingkat Transparansi Berdasarkan Kualifikasi Usaha	46
Tabel 4. 15 Uji Normalitas	46
Tabel 4.16 Nilai KMO dan <i>Bartlett's Test of Sphericity</i>	48
Tabel 4.17 Nilai <i>Anti Image Matrices Correlation</i> Variabel Setelah Uji MSA	49
Tabel 4.18 Nilai <i>Anti Image Matrices Correlation</i> yang Tidak Dapat Dilanjutkan.....	50

Tabel 4.19 Nilai <i>Anti Image Matrices Correlation</i> setelah variabel dikeluarkan dari uji MSA	51
Tabel 4.20 Nilai <i>Anti Image Matrices Correlation</i> setelah <i>variabel</i> dikeluarkan dari uji MSA	52
Tabel 4.21 Kontribusi Variabel hasil Ekstraksi	53
Tabel 4.22 Hasil Ekstraksi PCA	55
Tabel 4.23 Jumlah Faktor Hasil Ekstraksi (PCA).....	56
Tabel 4.24 <i>Component Matrix</i> Sebelum Rotasi Varimax	58
Tabel 4.25 <i>Component Matrix</i> Setelah Rotasi	59
Tabel 4.26 Hasil Interpretasi Variabel	62

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Tugas Dosen Pembimbing
: Kartu Bimbingan Tugas Akhir
: Berita Acara Seminar 1
: Berita Acara Seminar 2
- Lampiran II : Kuisioner Penelitian
: Surat Pengantar Izin Penyebaran Kuisioner
- Lampiran III : Tabelaris Hasil Penelitian
: Output SPSS

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. 2009. *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Salemba Empat
- Andrianto, Nico. 2007. *Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e- Government*. Bayumedia Publishing, Anggota IKAPI Jatim : Malang.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Construction Sector of Transparency Initiative, 2016, *Report on Construction Sector of Transparency Initiative Assurance Study*
- Departemen Pendidikan Indonesia (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ervianto. 2005. *Manajemen Proyek Konstruksi Edisi Revisi*
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Vol. Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- Hariyoso, S. 2002. *Pembaharuan Birokrasi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Peradaban.
- Hartono. 2015. *Partial Least Square (PLS)*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Tanjung, Hafiz. (2011). *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan)*. Bandung.
- Komarudin, Dan Satmoko, (2009), *Transparansi Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Kasus Teknologi Pengelolaan Air Bersih Dan Air Limbah Domestik*, JAI Vol 5 No. 1.
- Lukito, Penny. 2014. *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan*. Jakarta: Grasindo.
- Lyon, Liz. 2016. *Transparency: The Emerging Third Dimension of Open Science and Open Data*. Journal of the Association of European Research Libraries. Vol. 25 Issue 4
- Mahsun, Moh. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.

- Mardiasmo. 2006. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan: Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Vol. 2, No. 1
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Priana, Surya. 2019. *Jurnal Ensiklopedia: Konsep Pengembangan Kontraktor Skala Kecil*. Vol. 1 No.2
- Rofikoh, Nurul. 2006. *Mewujudkan Good Local Governance Melalui Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Publik. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik: Volume 10, Nomor 1*
- Parhusip, 2019. *Properti dan Perdagangan sebagai Sektor Dominan pada Data Bursa Saham dengan Principal Component Analysis (PCA)*. Jurnal. Prosiding Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains.
- Peter Salim dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta:Penerbit Balai Pustaka.
- P.Loina Lalolo Krina. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas,Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta.
- UNDP, 1997. *Reconceptualising Governance, Discussion Paper 2*, New York: 1997.
- Simamora, Bilson. 2005. *Analisis Multivariat Pemasaran*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi* . Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Simanjorang, Christina. 2016. *Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)*. Skripsi. Universitas Pasundan.
- Yulianto, Feldi. 2018. *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2015*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang
- Zidni, Adi. 2008. *Identifikasi Keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi Dalam Proses Lelang Jasa Konstruksi*. Skripsi. Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 4 Tahun 2014

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 450/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi yang Wajib Disediakan Di Kementrian PUPR

UU No 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Keppres 80 Tahun 2003

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi